BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah dasar bagi kemajuan negara karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang bisa memperoleh pengetahuan dan menciptakan hal berguna, untuk dirinya dan juga bagi orang lain. Sebagai pihak yang memiliki tugas menjaga kesejahteraan masyarakatnya, negara juga berperan dalam memperbaiki mutu pendidikan. Hal ini karena kemajuan sebuah negara bisa dilihat dari seberapa baik kualitas pendidikannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa dalam mengembangkan potensi diri. Tujuannya agar siswa memiliki kekuatan spiritual, bisa mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang baik, cerdas, berakhlak, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Selain itu, setiap anak berusia 7 sampai 15 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar.

Dalam Pasal 34 ayat 2 Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menyelenggarakan program wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sementara itu, Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan wajib belajar ada pada negara, yang dijalankan oleh lembaga pendidikan milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Artinya, pemerintah pusat dan daerah wajib

menyediakan layanan pendidikan bagi semua siswa di jenjang SD dan SMP atau setara.

Di Indonesia memiliki beberapa permasalahan pendidikan yaitu putus sekolah, masih ada anak di usia sekolah yang belum bisa mendapatkan pendidikan karena berbagai penyebab diantaranya karena ekonomi. Permasalahan itu harus segera mendapatkan tindak lanjut untuk kemajuan Bangsa Indonesia, oleh karena itu dalam rangka upaya pemerintah mencapai target program wajib belajar selama 9 tahun melalui Departemen Pendidikan Nasional pemerintah menciptakan program BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Sebagai dukungan terhadap program wajib belajar dari pemerintah, serta sebagai langkah untuk memenuhi kewajiban menyediakan pendidikan dasar secara gratis. Pada awalnya BOSP Program ini merupakan kompensasi dari kebijakan bahan bakar minyak tahun 2005, yang tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Dana BOSP diserahkan kepada sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana BOSP menjadi sumber utama pembiayaan non personalia di Sekolah seperti kebutuhan kegiatan belajar mengajar, buku, sarana penunjang pembelajaran, biaya listrik, internet dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan pendukung di sekolah.

Pengurusan Dana BOSP berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektif, efisiensi, tanggung jawab yang jelas dan keterbukaan informasi seperti yang tertulis pada Permendikbud No 6 tahun 2021, maka sekolah diwajibkan melaporkan penggunaan dana BOSP secara riil dan seutuhnya, serta mempublikasikan laporan

penggunaan dana tersebut pada media informasi sekolah atau lokasi lain yang dapat dilihat oleh masyarakat umum (transparan).

Transparansi pada pengelolaan keuangan berarti kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai kegiatan politik dan ekonomi pemerintah beserta kebijakannya. Dengan transparansi, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah atau instansi lain yang memakai dana negara. Adanya transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana keuangan BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di sekolah. Apabila biaya untuk aktivitas pembelajaran dan rancangan yang memanfaatkan dana BOSP, dan laporan pertanggungjawabannya disampaikan dengan jelas kepada publik baik lewat ucapan atau tulisan, dengan sikap terbuka untuk diawasi oleh pihak terkait, maka penggunaan dana BOSP dan pelaporannya bisa dipercaya.

Beberapa indikator yang efektif dalam pelaporan dana BOSP meliputi kemudahan dan kecepatan penyusunan laporan, ketepatan dan akurasi data, kepatuhan terhadap standar akuntansi, ketepatan waktu pelaporan, efisiensi penggunaan sistem informasi, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan. Implementasi indikator ini terbukti meningkatkan efektifitas laporan, akuntabilitas dan penyelewengan dana dilingkungan sekolah.

Pengelolaan dana BOSP memerlukan Tim Pengelola Dana BOSP (Tim Manajemen BOSP) agar pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP bisa berhasil, efisien, akuntabel dan transparan. Untuk mencapai pelaporan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan diperlukannya sumber daya manusia yang

mumpuni serta laporan keuangan yang akuntabel. Mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan yang mumpuni, memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dalam mengelola dana BOSP di sekolah.

Karakteristik pengelola dana BOSP mencakup beberapa aspek penting diantaranya memiliki kemampuan mengelola dana secara terbuka, secara transparan, memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana secara jelas dan tepat cocok dengan juknis yang diterapkan, memiliki kemampuan perencanaan dan pelaporan yang baik, termasuk menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) secara detail dan akurat serta melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tepat, berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan dana, memiliki integritas dan disiplin dalam tata usaha dan memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi serta kerja sama yang baik dengan berbagai orang atau kelompok terkait untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana BOSP. Serta karakteristik yang juga menunjukkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap cara membuat laporan keuangan dan mengambil keputusan penting.

Karakteristik pengelola dana BOSP sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaporan dana BOSP pada kurikulum merdeka yang cukup kompleks. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya pengaruh simultan karakteristik bersama transparansi dan akuntabilitas, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, peran tim pengelola BOSP, kepatuhan terhadap manajemen berbasis sekolah, keterlambatan dan ketelitian dalam pelaporan. Beberapa indikator terkait dengan karakteristik pengelola dana BOSP adalah jenjang pendidikan, jenis pendidikan

yang ditempuh, umur, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Kelengkapan, akurasi dokumen pelaporan dimana pengelola memiliki kemampuan administrasi yang baik, memahami kebijakan dan petunjuk teknis yang ada serta transparan dan akuntabilitas dalam pelaporan.

Dalam pelaporan dana BOSP sistem akuntansi keuangan juga memegang peranan utama, menjamin tanggung jawab yang jelas dan keterbukaan informasi pengelolaannya. Implementasi sistem akuntansi yang bagus, dengan standar yang cocok juga petunjuk teknis yang diterapkan, akan memudahkan pelaporan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana, sekaligus menjadi alat kontrol internal yang efektif bagi sekolah. Implementasi Indikator dalam sistem informasi akuntansi sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaporan dana BOSP khususnya dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah meliputi efisiensi proses *input* dan *output*, akurasi dan akuntabilitas data, transparansi dan keterbukaan informasi, ketepatan waktu pelaporan, integrasi data dan keterhubungan sistem, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dukungan pelatihan.

Dengan kemajuan teknologi, sistem pelaporan telah terintegrasi secara *online* www.bos.kemdikbud.go.id dan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sangat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan dana BOSP di sekolah, namun tidak semua warga sekolah memahami tentang adanya Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Pemerintah menganjurkan bagi sekolah penerima BOSP harus dilakukan

keterbaruan data dimasukkan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Dengan sistem ini, pemerintah meminta sekolah untuk memaksimalkan pelaporan secara online agar proses penyusunan dan pelaporan penggunaan dana BOSP menjadi lebih mudah.

Menurut Shilvia Hayatun Nopus (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa walaupun sudah berlangsung selama beberapa tahun, masalah keterbukaan dan tanggung jawab masih terjadi dalam pengelolaan dana BOSP di Aceh. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOSP, dimana pengurusan dana BOSP biasanya hanya beberapa orang di sekolah saja yang tahu, terutama kepala sekolah dan bendahara, sementara perwakilan dari orang tua dan masyarakat dalam bentuk komite sekolah kurang dilibatkan masih sangat minim. Sehingga menyebabkan terjadinya penyelewengan dana BOSP. Menurut Feri Hernando (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masih banyak pengelola yang masih kurang faham akan sistem informasi akuntansi keuangan dana BOSP SD di Kabupaten Siak.

Pengurusan dana BOSP di SMPN 2 Mojoagung terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya kurangnya partisipasi warga sekolah dalam penyusunan RKAS, tingkat pendidikan pengelola keuangan yang masih setara SMA (Sekolah Menengah Atas), serta sering berubahnya sistem akuntansi keuangan sehingga diperlukannya pembelajaran dan pelatihan kembali. Tidak semua guru dan karyawan mengetahui dan memahami adanya sistem informasi dan akuntansi di sekolah.

Dari latar belakang yang disampaikan, peneliti tertarik melakukan penelitian “Pengaruh Transparansi, Karakteristik Pengelola dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP pada Kurikulum Merdeka yang difokuskan di lokasi SMPN 2 Mojoagung”.

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana transparansi, karakteristik pengelola dan sistem akuntansi keuangan di SMPN 2 Mojoagung terhadap efektivitas pelaporan dana BOSP dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka disatuan pendidikan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP ?
2. Apakah Karakteristik Pengelola berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP ?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP ?
4. Apakah Transparansi, Karakteristik Pengelola dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dana BOSP berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan dana BOSP.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP ?
2. Untuk mengetahui Karakteristik Pengelola berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP?
3. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP ?
4. Untuk mengetahui Transparansi, Karakteristik Pengelola dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dana BOSP berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaporan Dana BOSP ?

1.1. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk penyempurnaan pengelolaan dana BOSP dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dana BOSP.

2. Bagi Pihak lain

Diharap bisa menjadi referensi serta sumber informasi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman tentang kebijakan dana BOSP dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan.